



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Evaluasi Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tanjungpinang

Hoki Apriyenson^{*1}, Zuleriwari A.S¹, Arie Afriadi¹, Aria Bagiasa¹, Dea Rizky¹ Nefriwati Hilmi¹
Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Email Corresponding: apriyenson@gmail.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:
Received date: 1 April 2026
Revised date: 25 Juni 2026
Accepted date: 10 Oktober 2026

DOI:
<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i3.5692>

Based on the evaluation of the integration of regional development planning in Tanjungpinang City, this study aims to assess the synchronization between three key planning documents: RTRW, RPJMD, and RKPD. The approach used is qualitative analysis through document study, examining the alignment of vision, mission, goals, indicators, programs, and activities within these documents. The results show that while there is alignment in overarching themes such as infrastructure and environmental resilience, gaps exist in the linkage of programs and indicators across the documents. These gaps are particularly evident in sectors like HR development, economy, and governance, where the RTRW focuses more on long-term spatial frameworks without measurable performance indicators. The study concludes that to enhance the effectiveness of planning, there needs to be a stronger synchronization between the annual programs in the RKPD and spatial allocations in the RTRW, along with the development of mechanisms to link indicators across the three documents. This would support the achievement of development goals that are more measurable and integrated.

Keyword: Regional Development Planning, Document Synchronization, RTRW, RPJMD, RKPD.



*This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

ABSTRAKSI

Berdasarkan evaluasi integrasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang, penelitian ini bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara tiga dokumen perencanaan utama: RTRW, RPJMD, dan RKPD. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui studi dokumentasi, yang mengkaji keselarasan antara visi, misi, tujuan, indikator, program, dan kegiatan dalam ketiga dokumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesesuaian dalam tema besar seperti infrastruktur dan ketahanan lingkungan, terdapat kesenjangan dalam keterkaitan program dan indikator antara dokumen-dokumen tersebut. Kesenjangan ini terutama terlihat pada sektor SDM, ekonomi, dan tata kelola, di mana RTRW lebih berfokus pada kerangka ruang jangka panjang tanpa indikator kinerja yang terukur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, perlu adanya penguatan sinkronisasi antara program-program tahunan di RKPD dengan penetapan ruang dalam RTRW, serta pengembangan mekanisme penghubung indikator antara ketiga dokumen tersebut. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan Daerah, Sinkronisasi Dokumen, RTRW, RPJMD, RKPD.

Perencanaan pembangunan regional terpadu sangat penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) karena memastikan keselarasan antara inisiatif lokal dan tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mengintegrasikan SDGs secara efektif dalam strategi pembangunan daerah, seperti yang diterapkan di Indonesia, dibutuhkan dukungan multipihak serta pelokalan tujuan-tujuan ini agar lebih relevan dan berdampak (Putra et al., 2024). Pendekatan bottom-up dalam perencanaan daerah mendorong keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi setempat, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan (Veckalne & Tambovceva, 2023). Selain itu, inisiatif seperti Sabuk dan Jalan telah membuktikan bagaimana integrasi regional dapat meningkatkan faktor sosial ekonomi yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, misalnya melalui peningkatan pengeluaran untuk tata kelola dan kesehatan (Ullah et al., 2021). Untuk itu, strategi yang disesuaikan dengan mempertimbangkan komponen sosial, ekologi, dan ekonomi sangat penting dalam perencanaan yang efektif karena dapat mengatasi tantangan dan konteks regional yang spesifik (Двуліт et al., 2024). Secara keseluruhan, perencanaan pembangunan daerah yang terpadu tidak hanya memfasilitasi lokalisasi SDGs, tetapi juga memperkuat upaya kolaboratif yang akhirnya mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, dokumen-dokumen seperti RTRW (Perencanaan Tata Ruang Regional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memiliki peran penting, meskipun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. RTRW memberikan kerangka organisasi spasial yang memfasilitasi integrasi kebijakan di berbagai sektor, yang sangat krusial dalam memastikan pembangunan berkelanjutan (“The Integrating Role of Regional Spatial Planning: Five Mechanisms of Policy Integration,” 2022). RPJMD merinci prioritas strategis dan tujuan pembangunan untuk jangka menengah, menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, serta memastikan program-program tersebut terfokus pada kebutuhan daerah (Hersperger et al., 2024). Sementara itu, RKPD mengoperasionalkan RPJMD dengan menetapkan kegiatan tahunan serta alokasi anggaran yang tepat, menerjemahkan tujuan strategis menjadi rencana aksi yang lebih terukur dan dapat ditindaklanjuti (Cotella, 2018). Gabungan dari ketiga dokumen ini membentuk struktur tata kelola yang efektif, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mempromosikan alokasi sumber daya yang efisien dan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah (Grillitsch & Sotarauta, 2020; Purkarthofer et al., 2021).

Namun, di lapangan, Pemerintah Kota Tanjungpinang menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan yang ada, seperti program pemanfaatan tata ruang (SPPR), RKPD, dan RTRW. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya fokus pada target pembangunan yang jelas, sinergi yang terbatas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sistem penganggaran yang tidak efektif untuk pembangunan infrastruktur (Riawan, 2022a). Selain itu, terdapat perbedaan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan nasional agar rencana pembangunan yang dihasilkan dapat selaras (Ningrum et al., 2025). Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan sering kali menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti yang terjadi pada sektor perumahan di Tanjungpinang, dimana inkonsistensi dalam perencanaan menghalangi implementasi program yang efektif. Oleh karena itu, memperbaiki sinkronisasi dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan adalah hal yang sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan di Tanjung Pinang dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien (Riawan, 2022b; Setyawan & Tjenreng, 2025).

Urgensi evaluasi integrasi perencanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang semakin kuat karena kota ini menghadapi persoalan yang tidak hanya berupa ketidaksesuaian administratif antar dokumen. Tanjungpinang berkembang sebagai ibu kota provinsi pada wilayah pesisir dan kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, reklamasi pantai, dan perlindungan ekosistem mangrove berlangsung pada ruang yang sama. (Ananda, 2022) menemukan bahwa 22 dari 179 perumahan formal di Kota Tanjungpinang berada pada tingkat kerawanan banjir tinggi. Dari jumlah tersebut,

10 perumahan tidak sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW. Kerentanan ini juga terlihat di Kecamatan Bukit Bestari. Pemodelan genangan pesisir dengan skenario ketinggian air dua meter menunjukkan potensi dampak terhadap 4.112 unit rumah, bangunan perdagangan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan kegiatan industri (Hanif et al., 2021). Pada saat yang sama, tekanan aktivitas manusia terhadap ekosistem mangrove tergolong sangat tinggi di beberapa bagian Kelurahan Kampung Bugis, Dompok, dan Senggarang. Tekanan tersebut bersumber dari perkembangan permukiman, industri galangan kapal, jalan, jembatan, dan dermaga (Sutran et al., 2023). Kebijakan perizinan penimbunan lahan pada kawasan mangrove juga belum berjalan optimal karena terdapat tumpang tindih kebijakan antar instansi yang menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat (Nengsih et al., 2023). Aktivitas reklamasi di kawasan pesisir menambah kompleksitas perencanaan karena dapat memengaruhi kondisi fisik pantai dan dinamika gelombang laut di sekitar kawasan pembangunan (Nurlianti et al., 2023). Pada aspek kelembagaan, pembangunan infrastruktur juga masih menghadapi lemahnya fokus sasaran wilayah, rendahnya sinergi program antar-OPD, dan belum efektifnya sistem perencanaan serta penganggaran (Riawan, 2022a). Dengan demikian, fenomena khusus Tanjungpinang terletak pada pertemuan antara ekspansi kawasan terbangun, ancaman banjir pesisir, tekanan terhadap mangrove, reklamasi, dan fragmentasi kewenangan pembangunan. Kondisi tersebut menjadikan Tanjungpinang sebagai kasus penting untuk mengevaluasi sinkronisasi RTRW, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi diperlukan agar program dan anggaran pembangunan tidak hanya konsisten secara administratif, tetapi juga tepat lokasi, tangguh terhadap bencana, dan mampu melindungi ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi integrasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan sinkronisasi antara dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya melalui desain studi dokumentasi, merupakan metodologi yang efektif untuk mengeksplorasi pengalaman manusia yang kompleks dan fenomena sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks yang sudah ada sebelumnya, seperti buku harian, surat, dan dokumen publik, yang dapat memberikan wawasan yang kaya tanpa menghadapi tantangan logistik yang biasa terjadi dalam penelitian lapangan (*"A Methodological Exploration of Document Analysis as a Qualitative Research Method,"* 2024; Morgan, 2022). Analisis dokumen ini bukan hanya meningkatkan pemahaman tentang konteks tertentu, tetapi juga mengangkat isu-isu etika yang mungkin timbul dari keterlibatan langsung peserta penelitian (Morgan, 2022). Oleh karena itu, penelitian kualitatif melalui dokumentasi memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam ke dalam konteks yang lebih luas, memberikan interpretasi yang lebih kaya dan menyeluruh terhadap fenomena yang sedang dikaji (*"A Methodological Exploration of Document Analysis as a Qualitative Research Method,"* 2024).

Lebih lanjut, pendekatan kualitatif menekankan pentingnya reflektivitas dan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan interpretasi yang bermakna dari data yang dikumpulkan. Proses ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika yang lebih dalam, serta menggali makna dari data yang tampak lebih sederhana pada pandangan pertama. Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif, terutama yang berbasis dokumentasi, menawarkan sarana yang fleksibel dan mendalam untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang beragam, serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang sedang diteliti (Humayra & Albina, 2025).

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, yakni RTRW Kota Tanjungpinang 2020-2040, RPJMD Kota Tanjungpinang 2025-2029, dan RKPD Kota Tanjungpinang 2026. Proses analisis akan dilakukan terhadap elemen-elemen kunci dalam dokumen-dokumen tersebut, mencakup visi, misi, sasaran, indikator, program, dan kegiatan. Prosedur analisis yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama:

1. **Analisis Komparatif:** Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan isi dan struktur antara RTRW, RPJMD, dan RKPD, guna mengevaluasi kesesuaian antara tujuan, program, dan indikator yang tercantum dalam masing-masing dokumen.
2. **Analisis Sinkronisasi:** Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen tersebut, serta untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antara dokumen tersebut mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
3. **Analisis Kualitatif:** Menggunakan analisis konten untuk menilai kesesuaian dan relevansi masing-masing dokumen terhadap tujuan pembangunan daerah. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah elemen-elemen yang terdapat dalam dokumen perencanaan sudah sesuai dan saling mendukung dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Kesenjangan atau Ketidaksesuaian Program dengan Prioritas yang Telah Ditetapkan

Dalam evaluasi perencanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang dilakukan identifikasi dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD. Hal ini dilakukan untuk menggali makna dari setiap elemen dalam dokumen dan menilai tingkat kesesuaiannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Matriks Keseuaian Prioritas, Tujuan, dan Indikator

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026)	Bukti/rumusan di RKPD	Kesesuaian di RPJMD (tujuan/indikator)	Kesesuaian di RTRW (tujuan/indikasi program spasial)	Penilaian kesesuaian
Pembangunan SDM	Fokus peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan & religiusitas.” RKPD juga menurunkan ke indikator: IPM, RLS, HLS, UHH, stunting, kemiskinan, dll.	Selaras dengan Misi 2 RPJMD: Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten, berdaya saing dan berintegritas.	RTRW lebih dominan spasial, tapi arah besar RPJPD/RPJMD menjadi rujukan narasi; ada penekanan masyarakat sehat, cerdas sebagai landasan.	Sesuai
Pemberdayaan Ekonomi	Penguatan ekonomi masyarakat RT/RW; peningkatan UMKM & koperasi; optimalisasi pasar; pengembangan pariwisata; start-up; daya saing investasi.	Selaras dengan Misi 3 RPJMD: Pembangunan ekonomi produktif dan kreatif. Indikator ekonomi terukur muncul di tabel kontribusi sektor dalam PDRB.	RTRW menyatakan tujuan penataan ruang menitikberatkan “pariwisata budaya heritage dan ekonomi kreatif” dan ruang yang menarik investasi.	Sesuai
Pembangunan Infrastruktur	Perumahan, permukiman, infrastruktur; layanan air bersih, drainase, jalan, pengendalian banjir.” RKPD memuat program teknis PUPR: SDA/pengaman pantai, SPAM, air limbah, drainase, jalan, bangunan gedung, dll.	Selaras dengan Misi 1 RPJMD: Pembangunan & pemerataan infrastruktur dan RPJMD mengaitkan intervensi infrastruktur dengan indikasi program RTRW (banjir, PSU, PJU, sampah, jalan).	Sangat kuat: RTRW memuat rencana jaringan & indikasi program, misalnya pengembangan terminal (lokasi), jalan lingkar/jalan lokal, hingga rencana stasiun KA & tahapan.	Sangat Sesuai
Tata Kelola Pemerintahan	Berbasis kinerja aparatur bersih, modern, profesional, berintegritas & melayani. Contoh indikator operasional RKPD: jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah ditangani, dll.	Selaras dengan Misi 4 RPJMD tentang tata kelola pemerintahan. Indikator outcome ada: Indeks RB & Nilai SAKIP.	RTRW umumnya tidak bicara “kinerja birokrasi”, tetapi menyediakan “wadah ruang” (pusat pelayanan, jaringan prasarana, kawasan strategis) yang jadi prasyarat layanan.	Sesuai

			(Dukungan tidak langsung.)	
Lingkungan Hidup & Ketahanan Iklim	Sektor pembangunan lingkungan hidup, sosial & politik... berkelanjutan dan berketahanan. RKPD menurunkan indikator: IKLH, IKA, IKU, IKTL (dengan target 2026).	Selaras dengan Misi 5 RPJMD: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berketahanan iklim dan indikator IKLH/IKU/IKTL.	RTRW menekankan keseimbangan kawasan budidaya–lindung dan daya dukung; tujuan penataan ruang juga memuat aspek berkelanjutan.	Sesuai

Sumber: Hasil Analisis 2026

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1. Konsistensi paling kuat pada Infrastruktur karena RPJMD sudah secara eksplisit menautkan program prioritas ke indikasi program RTRW. Akan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM), Ekonomi, Tata Kelola dan Lingkungan juga selaras di level tema dan Indikator, hal itu juga berkaitan dengan RTRW yang kurang eksplisit dengan RKPD dan RPJMD. Hal tersebut umum terjadi karena RTRW bukan dokumen indikator kinerja.

B. Relevansi Tujuan dan Program

Identifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian antara dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD berdasarkan dokumen, Untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 2. Analisis Sinkronisasi antara RTRW, RPJMD, dan RKPD

Aspek	RTRW	RPJMD	RKPD	Kesenjangan/Ketidaksesuaian
Tujuan Pembangunan	Menyediakan kerangka jangka panjang untuk penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam.	Menekankan pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan SDM dengan pendekatan integrasi sektor.	Memfokuskan pada prioritas tahunan yang sangat operasional seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya.	Sinkronisasi: RPJMD dan RKPD lebih berorientasi ke output dalam jangka pendek, sementara RTRW lebih fokus jangka panjang pada struktur ruang dan pemanfaatan.
Penetapan Indikator	Tidak memberikan indikator langsung terkait dengan kinerja pembangunan seperti RPJMD/RKPD. Lebih mengarah ke indikator spasial (mis. pemanfaatan ruang, kawasan strategis).	Menyediakan indikator kinerja outcome seperti PDRB, IPM, sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Menghadirkan indikator tahunan yang sangat terperinci terkait dengan program/kegiatan tahunan. Misalnya, output dan hasil operasional yang harus dicapai dalam 1 tahun.	Kesenjangan: RTRW tidak memiliki indikator kinerja outcome seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini membuatnya kurang terukur dalam aspek pencapaian hasil pembangunan, mengarah pada kurangnya integrasi indikator kinerja antar dokumen.
Program Prioritas	Menyusun program-program besar yang lebih bersifat strategis (misalnya pengembangan jaringan transportasi, pengelolaan kawasan strategis, dll).	Menjabarkan program-program prioritas secara terperinci dengan indikator kinerja dan target jangka panjang.	Menetapkan program tahunan berdasarkan prioritas RPJMD, menurunkan program jangka panjang menjadi kegiatan operasional tahunan.	Sinkronisasi: Program dalam RPJMD lebih terperinci dan menyesuaikan dengan indikator kinerja yang harus dicapai. Sedangkan RTRW lebih berfokus pada arah umum tanpa memecahnya menjadi kegiatan/kegiatan terukur.
Penetapan Lokus/Tempat Intervensi	Menetapkan lokasi dan kawasan strategis untuk program ruang seperti transportasi,	Menyusun program prioritas berdasarkan lokasi dan sektor-sektor penting, seperti infrastruktur	Menetapkan lokasi dan kegiatan tahunan untuk peningkatan kualitas	Kesenjangan: RTRW memberikan acuan lokasi ruang tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan prioritas RPJMD/RKPD, sehingga

	pariwisata, dan permukiman.	dan pengentasan kemiskinan.	SDM dan infrastruktur.	kesesuaian ruang untuk pembangunan tidak selalu terintegrasi dengan jelas di level RPJMD/RKPD.
Pengelolaan Sumber Daya	Mengatur kawasan lindung dan budidaya untuk keberlanjutan pembangunan.	Memasukkan strategi pengelolaan sumber daya alam, termasuk konservasi dan pengelolaan risiko iklim.	Memprioritaskan pengelolaan sumber daya seperti air bersih, pembangunan fisik, dan penataan ruang.	Sinkronisasi: Ketiga dokumen ini sudah cukup selaras dalam pengelolaan sumber daya, namun lokasi dan tujuan jangka panjang perlu lebih terintegrasi di setiap perencanaan program tahunan dan kegiatan operasional.
Ketahanan Lingkungan	Fokus pada pembatasan ruang untuk kawasan rawan bencana (banjir, longsor, dll).	Menyusun program pengelolaan ketahanan iklim dan pemeliharaan lingkungan hidup.	Menetapkan kegiatan pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pemulihan daerah rawan bencana.	Sesuai: Tiga dokumen tersebut saling mendukung satu sama lain dalam upaya ketahanan lingkungan dan perubahan iklim, meskipun pada level RTRW, ketahanan lebih berbentuk arahan lokasi, dan RPJMD/RKPD lebih menekankan program ketahanan konkret.

Sumber: Hasil Analisis 2026

Berdasarkan hasil analisis sinkronisasi pada tabel 2. Dapat dilihat keterhubungan antar dokumen yang cukup kuat dalam hal tujuan jangka panjang, terutama untuk sektor infrastruktur dan lingkungan. Namun ada kesenjangan antara prioritas tahunan di RKPD dan penempatan ruang di RTRW, yang lebih bersifat strategis dan spasial. Indikator dan program dalam RPJMD lebih operasional dan terukur, sementara RTRW hanya memberikan kerangka besar dan lokasi untuk program-program tersebut. Kegiatan di RKPD perlu lebih memperhatikan lokasi dan ruang yang telah diatur di RTRW agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan dalam RPJMD.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun indikator outcome berbasis wilayah sebagai indikator penghubung antara RTRW, RPJMD, dan RKPD. Setiap arahan spasial dalam RTRW perlu dipetakan ke dalam indikator hasil, kondisi awal, target tahunan, lokasi prioritas, OPD penanggung jawab, dan program pendukung. Instrumen ini tidak mengubah RTRW menjadi dokumen kinerja tahunan, tetapi membantu OPD menerjemahkan arahan ruang ke dalam program, kegiatan, indikator, dan anggaran yang terukur dalam RKPD.

C. Implikasi Terhadap Pencapaian Pembangunan

Dalam evaluasi pembangunan digunakan analisis konten untuk menilai pengaruh kesesuaian atau ketidaksesuaian dokumen terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 3. Analisis Kualitatif Kesesuaian dan Relevansi Dokumen Terhadap Tujuan Pembangunan Daerah

Aspek	RTRW (Tanjungpinang 2024–2044)	RPJMD (Tanjungpinang 2025–2029)	RKPD (Tanjungpinang 2026)	Analisis Kualitatif
Tujuan Pembangunan	Penataan ruang untuk meningkatkan kualitas hidup, keberlanjutan, dan ketahanan ekonomi. Fokus pada kawasan strategis, pariwisata, dan ekonomi kreatif.	Meningkatkan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup melalui pencapaian indikator kinerja yang terukur. Fokus pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan iklim.	Fokus pada pencapaian prioritas pembangunan tahunan yang sesuai dengan prioritas RPJMD. Menurunkan program infrastruktur, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Kesesuaian dan relevansi: Ketiga dokumen memiliki tujuan yang komplementer, dengan RTRW memberikan kerangka ruang untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Indikator Kinerja	Tidak menyertakan indikator kinerja outcome secara spesifik. Lebih fokus pada program ruang dan kebijakan spasial (mis. pemanfaatan kawasan).	Menyertakan indikator yang lebih konkret dan terukur, seperti IPM, PDRB, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Indikator outcome ini dipakai untuk menilai kemajuan pembangunan.	Memuat indikator tahunan terkait dengan kegiatan operasional, termasuk output program, dan indikator yang lebih operasional dan terukur.	Kesenjangan: RTRW tidak memiliki indikator yang mengukur outcome. RPJMD dan RKPD memiliki indikator terukur yang memadai untuk memonitor kemajuan pembangunan. RTRW lebih bersifat spasial tanpa kaitan langsung pada indikator pembangunan.
Program Prioritas	Program prioritas utama berfokus pada pengelolaan ruang dan pembangunan kawasan strategis untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	Program prioritas mencakup pembangunan SDM, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan hidup. Memasukkan kegiatan yang lebih operasional dan terukur.	Memprioritaskan program tahunan yang terperinci sesuai dengan RPJMD, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.	Kesesuaian: Program dalam RPJMD dan RKPD lebih terperinci dan operasional, sedangkan RTRW memberikan arahan umum dalam penataan ruang yang mendukung program-program tersebut.
Keterkaitan Antar Dokumen	RTRW berfungsi sebagai acuan spasial untuk pembangunan jangka panjang dan menetapkan kebijakan ruang untuk mendukung sektor-sektor ekonomi utama (pariwisata, industri kreatif).	RPJMD menyediakan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur.	RKPD menurunkan prioritas RPJMD menjadi program tahunan dengan indikator terukur untuk setiap kegiatan yang dilakukan.	Keterkaitan cukup baik: RPJMD mencerminkan prioritas pembangunan yang ada di RTRW, dan RKPD memastikan prioritas tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan operasional tahunan. Namun, ada kesenjangan dalam keterkaitan indikator outcome di RTRW.
Lokasi & Ruang Intervensi	Menetapkan lokasi ruang untuk program pembangunan seperti infrastruktur dan pengelolaan kawasan. RTRW memberikan arah spasial.	Program-program dalam RPJMD lebih fokus pada outcome dan lokasi intervensi, tetapi tidak selalu menyertakan arah ruang secara spesifik.	RKPD menjabarkan kegiatan tahunan yang dilakukan berdasarkan lokasi dan sumber daya yang ada, namun tidak semua kegiatan memiliki hubungan langsung dengan penataan ruang di RTRW.	Kesenjangan: RTRW berfokus pada penataan ruang yang mengatur lokasi, sedangkan RPJMD dan RKPD lebih banyak berfokus pada output tahunan dan program operasional yang sering kali tidak terikat langsung dengan penataan ruang.

Sumber: Hasil Analisis 2026

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3. Keterhubungan tujuan pembangunan antara RTRW, RPJMD, dan RKPD sudah cukup baik, meskipun RTRW lebih berfokus pada penataan ruang dan RPJMD dan RKPD lebih terfokus pada program dan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD lebih lengkap dan terukur dibandingkan dengan RTRW, yang lebih memberikan arahan spasial dan kebijakan ruang tanpa indikator outcome yang jelas. Keterkaitan antar dokumen menunjukkan adanya sinkronisasi yang baik pada level prioritas pembangunan dan program operasional, meskipun ada kesenjangan dalam indikator outcome di RTRW, yang menyebabkan keterbatasan dalam menilai kemajuan pembangunan. Untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas, perlu dilakukan penajaman tujuan dalam RTRW dengan indikator kinerja outcome yang lebih terukur untuk setiap program ruang yang ada.

Pada program penataan dan relokasi pelaku UMKM Kota Tanjungpinang di sekitar Taman Gurindam 12, Melayu Square, dan Anjung Cahaya. Program ini secara substansi sejalan dengan prioritas RKPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penataan kawasan perkotaan. Namun, apabila lokasi pelaksanaannya tidak dikaitkan secara tegas dengan arahan RTRW, khususnya pada kawasan strategis pariwisata, perdagangan, dan ruang publik, maka program tersebut berisiko mengalami hambatan dalam pelaksanaan. Hambatan tersebut dapat berupa penyesuaian lokasi, keterlambatan perizinan pemanfaatan ruang, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta potensi penolakan dari pelaku usaha. Oleh karena itu, sinkronisasi antara lokasi kegiatan dalam RKPD dengan arahan ruang dalam RTRW menjadi penting agar program pembangunan tidak hanya tepat secara administratif dan anggaran, tetapi juga tepat secara spasial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dokumentasi yang memadukan perbandingan isi, penilaian sinkronisasi, dan analisis konten terhadap elemen visi–misi, sasaran, indikator, program, serta kegiatan pada RTRW, RPJMD, dan RKPD Kota Tanjungpinang, keterpaduan perencanaan menunjukkan pola yang relatif koheren pada tingkat tujuan dan tema besar pembangunan. Temuan utama memperlihatkan bahwa konsistensi paling kuat terjadi pada sektor infrastruktur, karena RPJMD secara eksplisit mengaitkan prioritas program dengan indikasi program spasial dalam RTRW, sehingga hubungan antar dokumen lebih mudah ditelusuri dan lebih operasional. Sementara itu, sektor SDM, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan cenderung selaras pada level tema dan indikator, namun keterkaitannya dengan RTRW kerap kurang eksplisit karena RTRW berfungsi terutama sebagai kerangka spasial jangka panjang, bukan dokumen kinerja berbasis indikator outcome.

Walaupun ketiga dokumen memiliki tujuan yang saling melengkapi (RTRW menyediakan kerangka ruang, RPJMD menetapkan arah serta target kinerja, dan RKPD menerjemahkannya menjadi prioritas tahunan), masih terdapat kesenjangan penting pada aspek penguncian lokus intervensi dan keterukuran hasil. Kesenjangan tersebut tampak ketika prioritas tahunan dalam RKPD belum selalu dirujuk secara tegas pada penetapan ruang/lokasi dalam RTRW, sehingga integrasi ruang dan program berisiko menjadi tidak konsisten dalam implementasi. Di sisi lain, ketiadaan indikator outcome pada RTRW membatasi kemampuan evaluasi kemajuan pembangunan berbasis kinerja lintas dokumen, meskipun dukungan terhadap ketahanan lingkungan dan perubahan iklim dinilai saling menguatkan (RTRW pada arahan lokasi, RPJMD/RKPD pada program konkret). Implikasi praktisnya, peningkatan efektivitas integrasi perencanaan memerlukan penautan yang lebih tegas antara kegiatan RKPD dengan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, serta pengembangan mekanisme penghubung indikator (misalnya indikator turunan/proksi) agar kerangka spasial RTRW dapat lebih terukur dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Methodological Exploration of Document Analysis as a Qualitative Research Method. (2024). 질적탐구. <https://doi.org/10.30940/jqi.2024.10.3.25>
- Ananda, H. (2022). Pemetaan tingkat kerawanan banjir kawasan perumahan kota tanjungpinang berbasis sig (sistem informasi geografis). <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFTSP/article/view/21986>
- Cotella, G. (2018). The Routledge handbook to regional development in Central and Eastern Europe. *Regional Studies*, 52(11), 1595–1596. <https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1516029>
- Grillitsch, M., & Sotarauta, M. (2020). Trinity of change agency, regional development paths and opportunity spaces: Progress in Human Geography, 44(4), 704–723. <https://doi.org/10.1177/0309132519853870>
- Hanif, M., Putra, B. G., Hidayat, R. A., Ramadhan, R., Shafrina, W., Moh, W., Hermon, D., Suhana, E., & Makassar, U. F. (2021). IMPACT OF COASTAL FLOOD ON BUILDING , INFRASTRUCTURE , AND COMMUNITY ADAPTATION. 21(2).

- Hersperger, A. M., Sciara, G.-C., Bacău, S., Imhof, C. S., & Zhao, C. (2024). Governing urban regions with a network of plans. *Cities*. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104683>
- Humayra, R., & Albina, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif. *Jurnal Nakula*, 3(5), 241–245. <https://doi.org/10.61132/nakula.v3i5.2204>
- Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nengsih, N. S., Sujono, A., & Kurniadi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Perizinan Penimbunan Lahan di Kawasan Hutan Mangrove Kota Tanjungpinang Prodi Ilmu Pemerintahan , STISIPOL Raja Haji keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir , pengawasan yang ditunjukkan Kota di bidang lingkungan hidup dalam rangka menyelenggarakan urusan lingkungan. 4, 242–253.
- Ningrum, S., Dwiputri, D. A., Agus, R., Fazarani, F., & Roseline, H. (2025). Policy Harmony or Dissonance? Investigating Alignment in Indonesia's Multi-Level Governance System. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5741>
- Nurlianti, D., Suhana, M. P., Putra, R. D., Studi, P., Kelautan, I., Maritim, U., Haji, R. A., Studi, P., Perkapalan, T., Teknik, F., Maritim, U., Ali, R., Riau, K., & Pinang, K. T. (2023). MODEL HIDRODINAMIKA 2 DIMENSI GELOMBANG LAUT PERMUKAAN DI SEKITAR LOKASI REKLAMASI KOTA TANJUNGPINANG HYDRODYNAMIC MODEL 2 DIMENSIONS OF OCEAN WAVE AROUNDS THE RECLAMATION. 16(3), 203–216.
- Purkarthofer, E., Purkarthofer, E., Sielker, F., Stead, D., & Stead, D. (2021). Soft planning in macro-regions and megaregions : creating toothless spatial imaginaries or new forces for change? *International Planning Studies*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/13563475.2021.1972796>
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the Sustainable Development Goals into a Regional Development Plan in Indonesia. *Sustainability*, 16(23), 10235. <https://doi.org/10.3390/su162310235>
- Riawan, W. A. (2022a). Sinkronisasi program pemanfaatan ruang (sppr) berbasis rencana tata ruang di kabupaten bintan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah kabupaten bintan. *Jurnal Potensi*, 2(1), 44–56. <https://doi.org/10.37776/jpot.v2i1.820>
- Riawan, W. A. (2022b). Sinkronisasi program pemanfaatan ruang (sppr) kota tanjungpinang dalam mendukung penyusunan prioritas program pembangunan daerah. 3(1), 136–149. <https://doi.org/10.51742/pelita.v3i1.510>
- Setyawan, I. H., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Analisis Sinkronisasi RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 574–587. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1281>
- Sutran, S., Suryanti, A., & Zulfikar, A. (2023). Indeks Antropogenik Mangrove di Kota Tanjungpinang , Provinsi Kepulauan Riau. 7(1), 44–51.
- The integrating role of regional spatial planning: five mechanisms of policy integration. (2022). *Town Planning Review*, 93(4), 423–450. <https://doi.org/10.3828/tpr.2021.53>
- Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., & Hashmi, S. H. (2021). Nexus of regional integration, socioeconomic determinants and sustainable development in belt and road initiative countries. *PLOS ONE*, 16(7). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0254298>
- Veckalne, R., & Tambovceva, T. (2023). Sustainability in Regional Planning: A Bibliometric Analysis. *TalTech Journal of European Studies*, 13(1), 133–149. <https://doi.org/10.2478/bjes-2023-0007>

Двуліт, З., Maznyk, L., Horbal, N., Brych, L., Skrzypek-Ahmed, S., Szymoniuk, B., & Dluhopolska, T. (2024). Modeling the Integrated Influence of Social, Ecological, and Economic Components on Achieving Sustainable Development Goals: A Cross-Country Analysis. *Sustainability*, 16(22), 9946. <https://doi.org/10.3390/su16229946>